



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI JUMAT, 5 APRIL 2013



DAFTAR ISI

PLN	1
PLTP Sarulla	2
Bandara	3
Transportasi	4
Air Bersih	5



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☐ Mar

☒ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☒ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
PLN Beli Listrik PLTP Sarulla	<div><div>PLN akan membeli listrik yang diproduksi oleh Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sarulla</div><div>Proyek PLTP Sarulla 330 megawatt (mw) berlokasi di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas bumi Sarulla milik PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Kab. Tapanuli Utara dan Kab. Tapanuli Selatan, Sumut</div><div>Proyek Sarulla ini akan menjadi salah satu Pembangkit listrik terbesar di dunia yang pembiayaannya akan dibantu oleh beberapa Bank</div></div>				PT. PLN	

PLN Beli Listrik PLTP Sarulla

■ Fitria Andayani

JAKARTA — Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan membeli listrik yang diproduksi oleh Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sarulla. Listrik tersebut akan dibeli dengan harga rata-rata 6,79 sen dolar AS setiap kilowatt-hour (kWh).

Perjanjian jual beli ini tertuang dalam amandemen kedua kontrak penjualan energi antara PLN dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan konsorsium Medco-Ormat-Itochu-Kyushu. Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyambut gembira kesepakatan ini. “Proyek ini telah disiapkan sejak 1993 dan akan mulai beroperasi pada 2016. Kami berharap, pembangunan PLTP ini segera direalisasikan,” katanya, Kamis (4/4).

Proyek PLTP Sarulla 330 megawatt (mw) berlokasi di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panasbumi

Sarulla milik PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bertindak selaku kontraktor dari PT PGE adalah konsorsium Medco-Ormat-Itochu-Kyushu. Mereka sekaligus akan membangun dan mengoperasikan pembangkit PLTP ini.

Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan konsorsium adalah membangun pembangkit PLTP di dua lokasi, yaitu Silangkitang (220 mw) dan Namora (110 mw). Selain itu, transmisi berkapasitas 150 kilovolt (kV) sepanjang 15 kilometer. Transmisi ini akan menghubungkan kedua lokasi pembangkit PLTP dan gardu induk Sarulla milik PLN.

Direktur Utama Medco Power Fazil E Alfitri menyatakan, pembangunan PLTP Sarulla akan dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama akan beroperasi pada 2016. Sedangkan, tahap kedua beroperasi pada 2017 dan tahap ketiga pada 2018.

Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla ini akan memenuhi kebutuhan listrik sistem wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara.

Menurutnya, proyek Sarulla ini akan menjadi salah satu Pembangkit listrik terbesar di dunia yang pembiayaannya akan dibantu oleh beberapa bank. Di antaranya, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Proyek PLTP Sarulla ini masuk dalam daftar proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan. PLN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010.

Oleh karena itu, pemerintah melalui menteri Keuangan akan memberikan jaminan kelayakan usaha terhadap proyek ini. ■



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☐ Mar

☒ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☒ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
PLTP Sarulla Beroperasi 2016	<div><div>- PT. PLN akan membeli listrik yang diproduksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla</div><div>- Proyek PLTP Sarulla kapasitas 330 megawatt (MW) berlokasi di wilayah kerja panas bumi Sarulla milik PT. PGE di Kabupaten Tapanuli Selatan</div><div>- Listrik yang dihasilkan PLTP Sarulla akan memenuhi kebutuhan listrik wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara</div></div>					

KELISTRIKAN

PLTP Sarulla Beroperasi 2016

JAKARTA, KOMPAS — Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla, yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 2016. Hal ini setelah ada kejelasan terkait kepemilikan aset dalam proyek itu.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan membeli listrik yang diproduksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla. Hal itu tertuang dalam amandemen kedua perjanjian jual-beli tenaga listrik antara PT PLN dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan konsorsium Medco-Ormat-Itochu-Kyushu, yang ditandatangani Kamis (4/4), di Jakarta.

Naskah amandemen kedua perjanjian itu ditandatangani Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Muhammad Husen, dan Presiden Direktur Medco Geopower Sarulla Noor Wahyu Hidayat. Selain itu, ditandatangani Direktur Orsarulla Inc (Ormat) Ammon Ga-

bbay, Direktur Sarulla Power Asset Ltd (Itochu) Takao Shinohara, Direktur Kyuden Sarulla PTE Ltd (Kyushu) Takashi Tajiri, dan Direktur Sarulla Operations Ltd (Sol) Takao Shinohara.

Nur Pamudji menyatakan, PT PLN akan membeli listrik yang dihasilkan PLTP Sarulla dengan harga rata-rata 6,79 sen dollar AS per kWh. Proyek itu disiapkan sejak 1993, tetapi baru 20 tahun kemudian akan dibangun dan ditargetkan beroperasi pada 2016. "Kami berharap pembangunan PLTP ini segera direalisasikan agar memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujarnya.

Proyek PLTP Sarulla kapasitas 330 megawatt (MW) berlokasi di wilayah kerja panas bumi Sarulla milik PT PGE di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kontraktor dari PT PGE adalah Konsorsium Medco-Ormat-Itochu-Kyushu, yang sekaligus akan membangun dan mengoperasikan PLTP tersebut.

Konsorsium akan membangun pembangkit di dua lokasi, yaitu Silangkitang (220 MW) dan Namora (110 MW), serta transmisi 150 kilovolt (kV) sepanjang 15 kilometer dari kedua lokasi pembangkit PLTP sampai ke Gardu Induk Sarulla milik PT PLN. Pembangunan PLTP Sarulla itu akan dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama ditargetkan akan beroperasi 2016, tahap kedua beroperasi 2017, dan tahap ketiga beroperasi pada 2018.

Presiden Direktur PT Medco Power Indonesia Fazil E Alfitri menjelaskan, pihaknya bersama anggota konsorsium telah menandatangani perjanjian jual-beli energi dan kerja sama operasi dengan PT PLN dan PT PGE. Perjanjian itu meliputi pembangunan PLTP kapasitas 330 MW untuk jangka waktu 30 tahun yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara. Listrik yang dihasilkan PLTP Sarulla akan memenuhi kebutuhan listrik wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara. (EVY)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
8 Bandara Diperluas	<div><div>- Hanya dua bandara yang sekaligus dilengkapi akses kereta api, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara</div><div>- Bandara Supadio, Kab. Kubu Raya, Kalbar, termasuk bandara yang memperluas terminal penumpang dan membangun landas pacu baru</div><div>- Salah satu kendala pengembangan wisata di Flores sejauh ini belum tersedianya bandara yang dapat didarati pesawat berbadan besar</div></div>			Rp. 8 triliun	PT. Angkasa Pura II	

8 Bandara Diperluas

Flores Butuh Bandara Bertaraf Internasional

PONTIANAK, KOMPAS – PT Angkasa Pura II memperluas delapan bandar udara karena jumlah penumpang pesawat terus meningkat, sementara kapasitas terminal dan landas pacu terbatas. Tahun 2012, jumlah penumpang di wilayah kerja PT Angkasa Pura mencapai 81 juta orang.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko mengatakan, setiap tahun jumlah penumpang bertambah sekitar 15 persen. Padahal, hanya ada dua bandara, yakni Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh dan Bandara Sultan Thaha di Jambi, yang kapasitasnya masih bisa menampung lonjakan penumpang.

"Perluasan bandara dilakukan bertahap dalam beberapa tahun. Umumnya, pengerjaan selesai tahun 2014 hingga 2015," ujar Sunoko, se usai penyerahan bantuan lima ambulans untuk puskesmas di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (4/4).

Tahun 2013, PT Angkasa Pura II mengalokasikan dana sekitar Rp 8 triliun untuk melanjutkan proyek perluasan delapan bandara. Namun, hanya dua bandara yang sekaligus dilengkapi akses kereta api, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan Bandara Kuala Namu, Sumatera

Utara. Infrastruktur ini dikerjakan PT Kereta Api Indonesia. Kuala Namu ialah bandara baru.

Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, termasuk bandara yang memperluas terminal penumpang dan membangun landas pacu baru. General Manager PT Angkasa Pura II Cabang Pontianak Chandra Dista Wiradi menuturkan, terminal penumpang yang baru akan bisa menampung 3,5 juta orang. Saat ini, terminal penumpang berkapasitas 1 juta orang, tetapi jumlah penumpang pada akhir 2012 sekitar 2 juta orang.

Landasan baru sepanjang 3.000 meter akan dibuat sejajar dengan landasan yang saat ini digunakan. Landasan baru itu memungkinkan untuk digunakan pesawat yang lebih besar dibandingkan dengan pesawat yang saat ini melayani penerbangan dari dan ke Pontianak. Dengan demikian, kapasitas ang-

kut pesawat juga bertambah.

Ketua Biro Jasa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalbar Burhanuddin Haris menyatakan, peningkatan kapasitas angkut pesawat diharapkan bisa langsung menurunkan harga tiket. "Saat ini, konsumen sering tak punya pilihan selain membeli tiket mahal dari dan ke Pontianak pada waktu-waktu tertentu. Bahkan, dalam setahun bisa lima kali terjadi kenaikan harga tiket yang sangat tinggi," ujar Burhanuddin.

Pariwisata di Flores

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengakui, sektor pariwisata sangat dimungkinkan menjadi andalan ekonomi rakyat di Flores dan juga Lembata karena memiliki berbagai obyek wisata bernilai tinggi. Namun, pengembangan serta pemberdayaannya perlu didukung kehadiran bandara bertaraf internasional di kawasan Flores sehingga bisa mendatangkan wisatawan dalam jumlah banyak.

"Salah satu kendala pengembangan pariwisata di Flores sejauh ini belum tersedianya bandara yang dapat didarati pesawat berbadan lebar. Hampir setiap kabupaten memiliki bandara, tetapi hanya bisa didarati pe-

sawat ukuran kecil," kata Frans.

Flores memiliki Taman Nasional Komodo (TNK), yang di sejumlah pulau seperti di Komodo dan Rinca merupakan habitat utama komodo. Keberadaan binatang purba itu kini menjadi salah satu dari tujuh keajaiban alam dunia. TNK persisnya berlokasi di Selat Sape, wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Obyek wisata lainnya ialah *mbaru niang* atau rumah adat khas Manggarai di Wae Rebo (Manggarai), Danau Triwarna Kelimutu di Kabupaten Ende, ritus *semana santa* di Larantuka (Flores Timur), dan penangkapan ikan paus secara tradisional di Lamalera (Lembata). Lalu, obyek wisata 17 pulau dan perkampungan tua Bena di Kabupaten Ngada, taman laut di Teluk Maumere (Sikka), dan aneka atraksi budaya. Flores juga gudangnya kain tenun.

Saat ini ada dua bandara agak besar di Flores, yakni Bandara Frans Seda di Maumere dan Bandara Komodo di Labuan Bajo. Di luar itu, ada beberapa lokasi yang bisa dibangun bandara yang bertaraf internasional, antara lain di Mbay (Nagekeo). Lokasi lainnya di kawasan Pantai Tanjung Bendara, Kabupaten Manggarai Timur. (AHA/ANS)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pengembangan Angkutan Umum Terhambat Infrastruktur	<div>- Infrastruktur jalan yang belum memadai membuat pengembangan angkutan umum di Tangerang Selatan masih belum maksimal</div> <div>- Selain infrastruktur jalan, Tangsel juga masih belum memiliki terminal</div> <div>- Terminal di Tangsel menurut rencana dibangun di kawasan Pondok Cabe, Pelebaran dilakukan di sejumlah ruas jalan</div>					

TRANSPORTASI

Pengembangan Angkutan Umum Terhambat Infrastruktur

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Infrastruktur jalan yang belum memadai membuat pengembangan angkutan umum di Tangerang Selatan masih belum maksimal. Pemerintah Kota Tangsel misalnya melakukan moratorium penambahan angkutan kota akibat keterbatasan itu.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tangsel Wijaya Kusuma mengatakan, moratorium itu telah berlangsung sejak 2011. "Penambahan angkutan kota memang belum bisa dilakukan karena masih moratorium akibat infrastruktur yang memang belum memadai," kata Wijaya di sela-sela razia angkutan umum di Jalan Raya Ceger, Pondok Aren, Kamis (4/4).

Menurut Wijaya, saat ini di Tangsel ada sekitar 1.600 angkutan kota yang melayani berbagai trayek. "Saya tidak bisa mengatakan jumlah angkutan kota sebanyak itu cukup atau tidak,

tetapi memang kalau untuk penambahan belum bisa dilakukan. Saat ini kami tidak lagi mengeluarkan izin baru, sekarang hanya untuk peremajaan," ujarnya.

Ia menjelaskan, 1.600 angkutan kota itu melayani 24 trayek. Namun, hanya 20 trayek yang kini masih aktif. "Trayek yang tidak aktif itu mungkin karena kurang penumpangnya," ujar Wijaya.

Dari pantauan, kemacetan kerap mendera sejumlah ruas jalan di Tangsel akibat ketergantungan warga terhadap angkutan pribadi. Terdapat 60 titik kemacetan yang tersebar di tujuh kecamatan. Ruas jalan yang sering terjadi kemacetan parah, misalnya, adalah Jalan Padjadjaran dan Jalan Siliwangi (Pamulang), Jalan Juanda Ciputat, Jalan Serpong Raya, dan Jalan Tegal Rotan.

Selain infrastruktur jalan, Tangsel juga masih belum memiliki terminal. Akibatnya, angkutan kota itu justru kerap men-

jadi sumber kemacetan karena berhenti sembarangan di terminal bayangan. Wijaya mengatakan, terminal di Tangsel, menurut rencana, dibangun di kawasan Pondok Cabe. Pelebaran dilakukan di sejumlah ruas jalan, misalnya di Siliwangi, Puspitpek, dan Ciater.

Sejumlah sopir angkutan kota mengatakan, penambahan angkutan sebenarnya terus terjadi. Saiful, salah seorang sopir angkutan jurusan Taman Mangu-Kebayoran Lama, mengatakan, kenyataannya tetap ada penambahan angkutan kota.

"Katanya memang peremajaan, tetapi sebenarnya angkotnya tidak diganti, tetapi malah ditambah," katanya.

Sementara itu, terkait razia yang dilakukan, Wijaya mengatakan hal itu untuk mengantisipasi kejahatan dalam angkutan umum yang sering terjadi. "Salah satu sasaran kami dalam razia kali ini adalah membuka kaca

film mobil angkutan umum yang gelap. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kejahatan di angkutan umum," ujarnya.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan. Sejumlah angkutan kota tampak diberi surat bukti pelanggaran karena tidak dilengkapi surat-surat. Petugas juga mencopoti kaca film gelap di angkutan kota yang membandel.

Sudirman, salah seorang sopir lainnya, mengatakan, mendukung operasi penertiban angkutan umum itu. Menurut dia, operasi itu justru harus sering dilakukan karena sangat banyak angkutan kota liar yang beroperasi sehingga merugikan angkutan resmi.

"Kami justru senang kalau ada razia seperti ini karena banyak angkot yang tidak resmi beroperasi. Hanya saja selesai razia, angkutan yang tidak resmi itu tetap kembali beroperasi," katanya. (RAY)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☒ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Depok Kekurangan Sumber Air Bersih	<div>- Secara garis besar tingkat pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Depok baru sekitar 20% dari ideal</div> <div>- Hal lain yang menyebabkan belum maksimalnya pemenuhan air bersih sebab warga Depok membutuhkan sambungan-sambungan air</div> <div>- Kota Depok telah memiliki PDAM sendiri. Akan tetapi, karena dahulu kepemilikan PDAM atas dua wilayah, Depok dan Bogor, pengelolaannya saat ini belum maksimal</div>					

Depok Kekurangan Sumber Air Bersih

MARGONDA — Pemerintah Kota Depok mengklaim tingkat pemenuhan kebutuhan air bersih di kotanya cukup. Akan tetapi, secara garis besar tingkat pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Depok baru sekitar 20 persen dari ideal.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Abdul Ghofar Hasan mengatakan, memang saat ini kebutuhan air bersih bagi warga Depok sudah terpenuhi. Namun, secara keseluruhan belum maksimal. Belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga karena terbatasnya sumber air di Kota Depok. Sumber air di Depok saat ini hanya dua. “Satu di Jalan Citayam, Legong, dan satu lagi di Depok II,” ujar Abdul kepada *Republika*, Senin (1/4), di gedung DPRD Depok.

Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok saat ini juga masih dilakukan bersama pihak lain. Hal lain yang me-

nyebabkan belum maksimalnya pemenuhan air bersih sebab warga Depok membutuhkan sambungan-sambungan air. Menurut Abdul, sambungan-sambungan air dibutuhkan untuk mengaliri sumber air bersih ke tempat-tempat warga. Ia mengatakan, pemerintah pun sudah memasang sejumlah sambungan untuk jalannya aliran air. Akan tetapi, di sisi lain, sambungan tersebut tidak terpakai.

“Karena, masyarakat masih eksploitasi air bawah tanah. Mereka berpandangan air bawah tanah masih bagus,” ucapnya. Sementara, pembangunan sambungan air tetap dibutuhkan. Sebab, tingkat kebersihan sejumlah aliran sumber air dari kali-kali masih rendah. Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail pun mengatakan, dari 1.000 sambungan air yang harus dibangun, baru sekitar 64 yang dilaksanakan.

Abdul yang merupakan anggota

DPRD Komisi C dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, masih 20 persen pemenuhan kebutuhan air bersih di Depok sebab Depok juga mendapatkan sumber air dari Bogor. Ia berharap agar tahun-tahun berikutnya PDAM Depok lebih maksimal lagi.

Ia menegaskan, Kota Depok telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sendiri. Akan tetapi, karena dahulu kepemilikan PDAM atas dua wilayah, Depok dan Bogor, pengelolaannya saat ini belum maksimal. “Oleh karena itu, jika ini sudah *clear*, kami dapat kelola sendiri untuk PDAM,” ujar Abdul.

Ia menambahkan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebanyak 80 persennya, prosesnya akan dilakukan secara bertahap. “Termasuk untuk membentuk aturan hukum, sebuah perda,” katanya. ■ c61 ed: rahmad budi harto